

Intifada Diplomatik: Negara-Negara Yang Menentang Israel dan Dampaknya Terhadap Lanskap Politik Global

Mohammad Ilham Fahmi Rusdi¹, Nurul Fikriyatul Auliya², Nur Halifah³

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹Corresponding author: m.ilhamfahmi2000@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas fenomena "Intifada Diplomatik" dalam konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap lanskap politik global. Konflik ini, yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade, memiliki akar pada pendirian negara Israel tahun 1948 dan terus berkembang melalui perlawanan rakyat Palestina, termasuk dua gelombang utama Intifada pada 1987-1993 dan 2000-2007. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengintegrasikan sumber-sumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah untuk memberikan analisis yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahwa perkembangan Intifada, dari perlawanan non-kekerasan hingga aksi militan, bentuk perlawanan organisasi di Palestina, dukungan internasional terhadap Palestina dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intifada telah berkembang dari gerakan perlawanan non-kekerasan menjadi bentuk perjuangan yang lebih militanistik, yang tercermin dalam Intifada I (1987-1993) dan Intifada II (2000-2005). Perkembangan ini memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan ekonomi di kawasan, serta mempengaruhi pandangan dan dukungan internasional. Artikel ini juga menganalisis peran organisasi perlawanan Palestina seperti Fatah, PLO, dan Hamas, serta sikap beberapa negara yang menentang Israel, termasuk pemutusan hubungan diplomatik oleh negara-negara seperti Iran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa "Intifada Diplomatik" telah mengubah lanskap politik global dengan meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel dan memperkuat dukungan untuk perjuangan Palestina.

Kata kunci: Intifada, Israel-Palestina, Diplomasi, Konflik Internasional, Politik Global

ABSTRACT

This article discusses the phenomenon of the "Diplomatic Intifada" within the Israel-Palestine conflict and its impact on the global political landscape. This conflict, which has persisted for over seven decades, has its roots in the establishment of the state of Israel in 1948 and continues to evolve through Palestinian resistance, including two major waves of Intifada from 1987-1993 and 2000-2007. This study employs a literature review methodology with a descriptive-analytical approach, integrating sources from books, journals, and academic articles to provide a comprehensive analysis. The purpose of this study is to identify that the development of the Intifada, from non-violent resistance to militant actions, Palestinian organization resistance, has influenced international support for Palestine and intensified diplomatic pressure on Israel. The research findings indicate that the Intifada has evolved from a non-violent resistance movement to a more militant form of struggle, as reflected in Intifada I (1987-1993) and Intifada II (2000-2005). This development has had significant implications for the political and economic dynamics in the region and has shaped international views and support. The article also examines the role of Palestinian resistance organizations such as Fatah, the PLO, and Hamas, as well as the stance of several

countries opposing Israel, including the severing of diplomatic relations by nations such as Iran. The study concludes that the "Diplomatic Intifada" has transformed the global political landscape by increasing international pressure on Israel and reinforcing support for the Palestinian struggle.

Keywords: Intifada, Israel-Palestine, diplomacy, international conflict, global politics

Article History: Submitted: 26 June 2024 | Accepted: 30 December 2024 | Available Online: 31 December 2024

PENDAHULUAN

Konflik Palestina-Israel mendatangkan polemik di kancah dunia. Penyebab konflik bermula ketika Israel dideklarasikan pada Tahun 1948. Berdirinya Israel sebagai sebuah negara berdaulat di kawasan timur tengah menjadi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Israel dianggap bermasalah karena menganeksasi wilayah yang sudah dihuni oleh bangsa Palestina dan perluasan wilayah terus-menerus dilakukan oleh Israel dengan cara menginvasi wilayah Palestina (Minhajuddin dkk, 2023).

Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia modern, yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade. Akar konflik ini dapat ditelusuri jauh sebelum deklarasi berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Pada akhir abad ke-19, gerakan Zionisme muncul di Eropa dengan tujuan menciptakan negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini dipicu oleh meningkatnya anti-Semitisme di Eropa dan keinginan untuk membangun tanah air bagi orang Yahudi. Namun, Palestina saat itu sudah menjadi tempat tinggal bagi masyarakat Arab-Palestina yang telah menghuni wilayah tersebut selama berabad-abad.

Ketegangan mulai meningkat selama era Mandat Inggris di Palestina (1917–1948), ketika Inggris membuka pintu bagi imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Peningkatan populasi Yahudi menyebabkan bentrokan antara komunitas Yahudi dan Arab. Keputusan PBB pada tahun 1947 untuk membagi Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, justru memperparah konflik. Bangsa Arab menolak rencana tersebut, sementara kelompok Yahudi menerimanya dan mendeklarasikan negara Israel pada tahun 1948.

Mayoritas orang Israel, yang beragama Yahudi, percaya bahwa mereka akan menerima tanah Palestina yang dijanjikan Tuhan. Keyakinan inilah yang mendorong banyak orang Yahudi dari seluruh dunia untuk pergi ke Palestina sejak perang Arab-Israel pada tahun 1967. Mereka secara bertahap menghancurkan masyarakat Palestina dengan

berbagai cara, mulai dengan kekerasan dan mulai membangun permukiman secara bertahap. Jadi, selama beberapa dekade, permukiman Yahudi terus meningkat karena pemerintah Israel menjamin keamanan, listrik, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya (Kaslam, 2021)

Permukiman Yahudi di wilayah Palestina ini dijaga ketat oleh tentara Israel, dan perluasan wilayah yang dilakukan terus menerus oleh Israel di kawasan Palestina akhirnya hanya menyisahkan tepi Barat dan jalur Gaza bagi warga Palestina. Kekejaman Zionis yang kian merenggut nyawa penduduk Palestina mengambil perhatian dunia, meski pun PBB mengambil bagian, namun Israil mendapatkan sokongan dari Negara Amerika Serikat (AS). Negara kecil ini akan tetap melaksanakan kehendaknya, mengabaikan kritik internasional terhadap kebijakan dan tindakannya, meskipun menghadapi tekanan global yang besar (Syarif, 2019).

Konflik Palestina-Israel tetap menjadi isu global yang memancing perhatian dunia. Setiap upaya untuk mencapai perdamaian sering kali menemui jalan buntu akibat perbedaan pandangan yang mendasar antara kedua belah pihak. Bagi rakyat Palestina, perjuangan mereka untuk kemerdekaan adalah hak yang tak bisa ditawar, sementara bagi Israel, keamanan negaranya menjadi prioritas utama.

Konflik antara Israel dan Palestina terus berkecamuk hingga saat ini. Intifada I merupakan salah satu fase puncak perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Meskipun Perjanjian Oslo ditandatangani untuk mencapai perdamaian, hasilnya tidak memuaskan dan konflik berlanjut dengan pendudukan dan represi yang terus berlangsung.

Artikel ini akan membahas tentang (1) sejarah singkat seputar Intifada I, Intifada II dan bentuk Intifada yang masih berlanjut hingga sekarang, (2) Bentuk perlawanan dari organisasi di Palestina, dan (3) dukurgan dari beberapa negara yang kontra pada israel. Konflik Israel-Palestina yang kian memanas menguasai perhatian dunia. Konflik ini membawa Israel memiliki pertentangan dengan negara lain yang mengecamnya atas invasi yang dilakukan terus menerus di tanah Palestina yang telah menewaskan banyak nyawa.

Manfaat dari penelitian ini dari segi akademis untuk memperkaya teori tentang gerakan sosial solidaritas masyarakat di Palestina serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik yang terjadi antara Israel-Palestina. Manfaat praktis

pada penelitian ini untuk memberikan wawasan dan dukungan terhadap organisasi internasional dan sebagai bahan refleksi akan kekejaman Israel terhadap Palestina

METODE PENELITIAN

Untuk memahami dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Menurut Zed (2004) (Rijal Fadli, 2021), Di antara empat tahap studi pustaka adalah persiapan sumber daya: menyiapkan sumber daya seperti buku, jurnal, artikel, dan internet. Membuat bibliografi dengan membuat daftar pustaka yang akan digunakan sebagai sumber penelitian. Mengatur waktu dan membagi waktu secara efektif untuk membaca dan mencatat bahan penelitian. Membaca dan mencatat dengan cermat, kemudian menulis poin-poin penting yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui pencarian dan rekonstruksi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Untuk mendukung proposisi dan ide penelitian, bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Gerakan Intifada

Intifada adalah Istilah Arab yang secara harfiah berarti “pemberontakan” atau “perlawanan”. merupakan gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap penindasan, kezaliman dan eksploitasi yang berkepanjangan. Faktor-faktor yang memicu Intifada meliputi tekanan ekonomi, penyiksaan, diskriminasi dan pengambilalihan tanah air Palestina. Kondisi ini membangkitkan semangat perlawanan dan keinginan untuk menghilangkan penindasan, memperjuangkan hak asasi dan kemerdekaan. Intifada menjadi bentuk kebangkitan mengejutkan bagi berbagai pihak, menunjukkan keteguhan, kesabaran dan solidaritas rakyat Palestina dalam menghadapi penindasan Israel. (M suhaimi, 2013:30)

Pada tahun 1980, rakyat Palestina bangkit untuk membebaskan diri dan membela diri dari penjajahan Israel. Mereka melakukan gerakan yang disebut Intifadah I, yang berlangsung hingga tahun 1993. Pertama, Intifada dipicu oleh beberapa hal. Ini dibagi menjadi dua kategori: faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum berlaku untuk Intifada di Palestina karena pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan tentara Israel

terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun. Faktor kedua adalah penindasan yang dilakukan terutama terhadap sumber daya penting, seperti air, ekonomi, bangsa, dan kedudukan. (M Suhaimi, 2013) Gerakan pembebasan Palestina ini mereda setelah adanya sebuah perjanjian yang dikenal Oslo Accords (Kesepakatan Oslo) 1993 untuk melahirkan kesepakatan-kesepakatan menuju perdamaian. (Aswir F, 2021) yang menuntut perjanjian perdamaian kedua pihak harus mentaati hak asasi manusia dan aturan hukum lainnya dan juga rupanya memperbolehkan rakyat Israel hidup bebas di Palestina. Adanya perjanjian ini tidak membuat Israel merasa jera untuk berhenti menindas rakyat Palestina. (Abdul Fadhil, 2019:2)

Pada awalnya, gerakan Intifadah hanya terjadi di wilayah terpencil di Tepi Barat Gaza dan mirip dengan perlawanan dengan batu melawan militer Israel. Pada akhirnya, gerakan Intifadah inilah yang mengilhami gerakan perlawanan yang terorganisir yang sekarang dikenal sebagai Hamas, yang akan melawan Zionis Israel. (Abdul Fadhil, 2019) Orang-orang kuat Ikhawan Al-Muslimin seperti Syekh Ahmad Yassi dan Dr. Abd Aziz Rantisi adalah pemimpin Hamas. Jumlah pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina memicu perlawanan, termasuk penggunaan bom Hamas oleh Israel. Antara tahun 1993 dan 1999, 364 warga Palestina dibunuh tentara Israel, dan 258 Israel dibunuh milisi Palestina. (B'Tselem Report, 1999)

Konflik meningkat pada 28 September 2000 saat pemimpin Israel berkunjung ke lokasi suci yang diperebutkan. Kunjungan ini, dengan pengawalan militer dan pejabat partai, memicu kemarahan warga Palestina. Protes yang muncul dihadapi dengan kekerasan oleh pasukan Israel, mengakibatkan korban dari kedua pihak. Peristiwa ini memicu perlawanan rakyat Palestina yang berlangsung selama tujuh tahun, dari 2000 hingga 2007. Perlawanan ini dikenal dengan nama yang merujuk pada lokasi sakral tersebut. Selama periode ini, ribuan nyawa melayang dari kedua belah pihak, dengan jumlah korban Palestina empat kali lipat dibanding korban Israel. Konfrontasi panjang ini menandai babak baru dalam sejarah pertikaian di wilayah tersebut, menunjukkan kompleksitas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara dua bangsa yang mengklaim hak atas tanah yang sama (Sari, 2022). Pada bulan Juli 2014, sepuluh tahun setelah lahirnya Intifada Al-Aqsa, yang berhasil diakhiri dengan kematian pemimpin PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) Yasser Arafat, Intifada Ketiga muncul dan menimbulkan banyak kekhawatiran mengenai perang. Ini telah menjadi

proses perdamaian yang permanen dan tidak dapat diubah (Caroline Flammer, 2015:5-24).

Selama Intifada Al-Aqsa, perlawanan rakyat Palestina melibatkan aksi demonstrasi besar-besaran, bentrokan dengan pasukan Israel, hingga tindakan militan yang dipimpin oleh beberapa kelompok seperti Hamas dan Brigade Al-Aqsa. Perlawanan ini bukan hanya wujud protes terhadap kunjungan kontroversial pemimpin Israel ke Al-Haram Al-Sharif, tetapi juga respons atas pendudukan yang terus berlangsung, pembangunan permukiman Yahudi, serta blokade wilayah Palestina. Di sisi lain, Israel merespons dengan operasi militer intensif, yang melibatkan serangan udara, penahanan massal, dan pembangunan tembok pemisah di sepanjang Tepi Barat. Tembok ini dianggap sebagai langkah keamanan oleh Israel, tetapi dikecam oleh Palestina dan komunitas internasional sebagai upaya aneksasi wilayah yang melanggar hukum internasional.

Setelah Intifada Al-Aqsa, situasi di wilayah Palestina terus memanas meskipun tidak ada deklarasi resmi mengenai Intifada Ketiga. Protes dan perlawanan sporadis tetap terjadi, terutama di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, yang menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina. Pada tahun 2014, ketegangan meningkat tajam dengan pecahnya perang di Gaza, dikenal sebagai Operasi Protective Edge oleh Israel. Konflik ini dipicu oleh penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel, yang kemudian disusul oleh serangan militer besar-besaran di Gaza. Selama perang ini, ribuan warga sipil Palestina tewas, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, sementara infrastruktur Gaza hancur lebur. Meski konflik ini tidak disebut sebagai bagian dari Intifada, dampaknya memperkuat narasi perjuangan Palestina terhadap pendudukan Israel.

Meskipun demikian, semangat perlawanan terhadap Israel tetap kukuh dan terus berkembang dalam konteks politik, sosial dan ekonomi di kawasan Palestina. Perkembangan intifada hingga saat ini menunjukkan evolusi strategi perlawanan, meskipun tidak sebesar skala sebelumnya. Bentuk-bentuk perlawanan saat ini mencakup protes dan demonstrasi massal, pemboikotan produk Israel, perlawanan sipil melalui aktivisme, perlawanan budaya dan media, serta serangan terhadap infrastruktur militer dan pemukiman Israel. Semua ini menunjukkan keteguhan rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak, kemerdekaan dan kedaulatan atas tanah air mereka. Selain itu, perlawanan ini juga menyoroti pentingnya solidaritas internasional dalam menyelesaikan

konflik Israel-Palestina secara adil dan berkelanjutan.

Jejak Intifada pertama dan kedua hingga bentuk Intifada saat ini, memiliki dampak tersendiri, dampak historis konflik Israel-Palestina, baik Intifada pertama dan kedua mempengaruhi dinamika politik, ekonomi di kawasan tersebut, serta memperdalam pepecahan yang terjadi di antara Israel-Palestina. Di sisi lain dampak dari bentuk perlawanan ini mempengaruhi pandangan dan dukungan internasional terhadap konflik Israel-Palestina. Hal ini yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan mendapatkan perhatian luas di forum-forum internasional seperti PBB.

Organisasi Perlawanan Palestina

Dari perlawanan rakyat Palestina yang menginginkan meraih kemerdekaannya kembali akhirnya rakyat Palestina mendirikan beberapa organisasi/gerakan pembebasan diantaranya adalah, *Gerakan Fatah* dipelopori oleh rakyat Palestina yang tinggal di Timur Tengah ingin berjuang melalui organisasi dalam upaya pembebasan Palestina dari Israel. Fatah merupakan organisasi pertama dari kalangan Arab-Muslim Palestina. Organisasi yang sebelumnya memiliki semangat untuk revolusi Aljazair dan berafiliasi dengan marxisme. Di Kuwait, mereka yang bergabung dengan Fatah (yang sebelumnya dikenal sebagai *Harakah Tahrir Filistin* dan kemudian berubah menjadi *Harakah at-Tahrir al-Wathani al-Filisthini*) pertama kali dideklarasikan pada tahun 1957. Selama tiga puluh tahun, Khalil al-Wazir—juga dikenal sebagai Abu Jihad—adalah orang kedua dalam gerakan ini. Dia berasal dari Jalur Gaza. Pemuda IM Palestina adalah pendiri gerakan pembebasan (A.Muchsini, 2015: 1-17).

Yang kedua ialah *Organisasi Pembebasan Palestina (OPP)* atau *PLO* didirikan atas prakarsa Presiden Liga Arab Jamal Abdul Naser pada 1959 sebagai wadah perjuangan Palestina. Setelah beberapa pergantian kepemimpinan, OPP berhasil membentuk Majelis Nasional Palestina dan mengadakan konferensi pertama di al-Quds pada 1964, yang melegalkan OPP dengan Piagam Nasional Palestina. Di bawah kepemimpinan Yasser Arafat sejak 1969, OPP semakin mendapat pengakuan internasional. Pada 1974, OPP diakui negara-negara Arab sebagai organisasi tunggal rakyat Palestina yang legal, dan Arafat berpidato di PBB. OPP kemudian diterima sebagai anggota pengawas PBB, dan Palestina mendapat klausul tersendiri dalam persidangan PBB. Resolusi PBB 3236 pada 1975 mengakui hak-hak bangsa Palestina, termasuk hak untuk menentukan masa depan, merdeka, berdaulat, dan kembali ke negerinya (Shaleh,

2002).

Meskipun OPP mendapatkan pengakuan luas, perjuangan organisasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan berat. Pada tahun 1982, Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Lebanon dengan tujuan menghancurkan basis militer OPP di Beirut. Serangan ini memaksa OPP untuk meninggalkan Lebanon dan memindahkan markasnya ke Tunisia. Meskipun perpindahan ini menjadi pukulan besar secara logistik, OPP tetap mempertahankan perannya sebagai organisasi payung bagi perjuangan Palestina di kancah internasional. Dalam kondisi diaspora, OPP memanfaatkan dukungan dari negara-negara Arab dan dunia internasional untuk terus memperjuangkan hak bangsa Palestina.

Selain itu, deklarasi berdirinya Negara Palestina pada 15 November 1988 di Aljir menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi perjuangan OPP. Dalam deklarasi tersebut, OPP mengadopsi Piagam Nasional Palestina yang mempertegas klaim atas tanah air mereka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Deklarasi ini mendapat pengakuan dari lebih dari 100 negara di dunia, meskipun belum mendapatkan pengakuan penuh dari PBB karena veto dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Langkah diplomatik ini menunjukkan bahwa perjuangan OPP tidak hanya melalui jalur militer, tetapi juga upaya diplomasi yang mengedepankan solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Palestina-Israel.

Kemudian, pada 14 Desember 1987, dibentuklah *Hamas* yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yassin untuk mengakhiri perang antara Palestina dan Israel. Hamas juga merupakan tentara yang paling kuat dan sukses. Ini adalah cabang dan penerus gerakan Ikhwanul Islam. Menurut piagamnya, organisasi tersebut “memandang Islam sebagai cara yang mengandalkan ide, konsep, dan gagasan.” Gerakan ini harus dihukum oleh Islam dan harus dicarikan jalan keluarnya. Hamas juga ingin “memerintah Palestina, mendirikan negara Islam di sana dan menuntut pengetahuan seluruh dunia dari generasi ke generasi untuk mencapai tujuannya” (Shaleh, 2002:90).

Dukungan dari Negara Lain

Saat ini dukungan dari berbagai negara terus berdatangan melihat realita yang terjadi di Palestina. Selain dari konflik Palestina-Israel ada beberapa negara yang dikenal memiliki hubungan yang tegang atau kontra dengan Israel adalah negara-negara di dunia Arab dan beberapa negara mayoritas muslim lainnya. Ini karena konflik politik dan

teritorial yang telah berlangsung lama antara Israel dan sebagian besar negara Arab sejak pendirian Israel pada tahun 1948. Namun sebagian besar negara-negara yang kontra dengan Israel akibat dari konflik yang terjadi antara Palestina- Israel yang telah memakan waktu, di antaranya ialah:

a) Negara yang memutuskan hubungan Diplomatik dengan Israel

Sebelum revolusi Iran 1978, Iran dan Israel memiliki hubungan diplomatik yang baik. Namun, setelah revolusi, hubungan keduanya memburuk. Iran memandang Israel sebagai musuh dan menolak eksistensinya, serta mendukung kelompok Islam seperti Hamas dan Hizbullah. Hal ini menyebabkan ketegangan antara Iran dan Israel sejak saat itu (A S Muslim, 2023). Pergeseran drastis dalam relasi Iran-Israel terjadi setelah peristiwa besar di Iran pada akhir 1970-an. Pemimpin spiritual baru negara tersebut mengambil sikap tegas mendukung perjuangan Palestina, yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Keputusan ini menjadi titik balik signifikan. Dukungan terbuka Iran terhadap aspirasi politik Palestina memicu ketegangan dengan Israel. Hal ini menandai berakhirnya era kerja sama dan dimulainya periode permusuhan antara kedua negara. Perubahan drastis ini mencerminkan transformasi ideologis Iran pasca revolusi. Keberpihakan pada Palestina menjadi bagian integral dari identitas politik baru Iran, sekaligus menegaskan posisinya dalam konflik kawasan. Sejak saat itu, hubungan Iran-Israel terus diwarnai ketegangan dan permusuhan yang berlangsung hingga kini. Setelah revolusi, Iran memutuskan hubungan diplomatik *de facto* dengan Israel, yang menandakan perubahan signifikan dalam hubungan mereka. Pergeseran ini semakin nyata ketika Iran secara terbuka mendukung solusi satu negara, khususnya dalam konflik Israel-Palestina (Mhd Ilham, 2019: 1-8). Pada akhirnya, keadaan sosial politik tersebut menyebabkan munculnya persaingan antara Iran dan Israel.

Meskipun Yordania telah menjalin perjanjian damai dengan Israel sejak tahun 1994, hubungan diplomatik antara kedua negara kembali mengalami gejolak. Pada November 2023, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, memanggil kembali Duta Besar Yordania dari Israel sebagai bentuk kecaman atas pembunuhan warga sipil di Gaza oleh Israel. Yordania bahkan menyebut Israel telah menciptakan "bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya". Ratu Yordania, Rania, menyuarakan keprihatinannya terkait konflik Israel-Palestina, menyatakan bahwa konflik tersebut merupakan penderitaan manusia terbesar dalam sejarah modern. Ia menekankan

bahwa dunia belum mengambil tindakan tegas dan efektif untuk menghentikan pertikaian tersebut, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa, pengungsi, dan penderitaan bagi rakyat Palestina. Situasi ini mengindikasikan potensi ancaman terhadap hubungan diplomatik yang telah terjalin lama antara Yordania dan Israel.” (Pautan, 2023).

Bolivia telah memutuskan untuk memutus kembali hubungan diplomatiknya dengan Israel sebagai bentuk protes atas tindakan militer Israel di Gaza. Ini bukan kali pertama Bolivia melakukan hal serupa, karena pada 2009 di bawah kepemimpinan Presiden Evo Morales, Bolivia juga pernah memutuskan hubungan dengan Israel untuk mengecam tindakan Israel di Palestina. Namun, hubungan diplomatik antara Bolivia dan Israel kemudian dipulihkan pada tahun 2019. Kini, di bawah pemerintahan baru, Bolivia kembali mengambil keputusan tegas untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai negara Amerika Latin pertama yang melakukan hal tersebut, sebagai seruan protes atas aksi militer Israel di wilayah Gaza (Al-Jazeera, 2023).

Seiring meluasnya konflik dan kerusakan di wilayah Gaza, beberapa negara mengambil langkah diplomatik tegas terhadap Israel. Tiga negara di kawasan Timur Tengah memutuskan untuk memanggil pulang perwakilan diplomatik tertinggi mereka. Langkah serupa diambil oleh sebuah negara Afrika serta tiga negara di benua Amerika Latin. Tindakan ini mencerminkan ketidaksetujuan internasional terhadap situasi yang sedang berlangsung dan menunjukkan adanya tekanan diplomatik terhadap Israel dari berbagai penjuru dunia. Penarikan duta besar ini merupakan bentuk protes diplomatik yang signifikan dan dapat berdampak pada hubungan bilateral Israel dengan negara-negara tersebut (Paula Rosas, 2024).

b) Memutus hubungan ekonomi

Hubungan diplomatik *Turki-Israel* yang sempat membaik pada 2022 kembali memburuk pasca Perang Gaza. Presiden Turki Erdogan mengecam keras tindakan Israel, namun menghadapi kritik karena tak mencocokkan retorika dengan tindakan. Setelah reaksi publik, Turki Pada 3 Mei 2024, Turki mengumumkan penghentian sementara semua perdagangan dengan Israel sampai tercapai "gencatan senjata permanen" di Jalur Gaza. Langkah ini menyusul sanksi internasional lain terhadap Israel dan tekanan global untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut. Turki mengkritik sikap Israel yang tidak mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan memperingatkan serangan di

Rafah yang berpotensi menimbulkan "pembantaian". Negara-negara lain seperti Kolombia, Bolivia, dan Belize juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, sementara mitra dekat seperti AS, Inggris, dan Jerman tetap mendukung Israel namun lebih kritis terhadap tindakannya (Thea Arbar, 2024).

Akhirnya mengambil tindakan seperti penarikan duta besar dan mengumumkan penangguhan perdagangan. Penghentian sebagian besar perdagangan Turki-Israel, khususnya bahan konstruksi, memberi tekanan pada harga barang di Israel dalam jangka pendek. Namun, karena pangsa Turki yang relatif kecil dalam total perdagangan Israel, dampaknya diperkirakan terbatas dalam jangka panjang.

c) Memutus hubungan militer

Hubungan diplomatik Kolombia dengan Israel, yang telah terjalin sejak 1957 dengan berbagai kerja sama di bidang pendidikan, perdagangan, dan khususnya kontrak militer, kini terancam akibat konflik Israel-Palestina. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, yang keras mengkritik perang Israel di Gaza, menyebut pemerintah Israel melakukan 'genosida'. Akibatnya, pada Februari 2023, Kolombia menghentikan pembelian senjata dari Israel setelah pasukan Israel menembak warga Palestina di Gaza. Selanjutnya pada April 2023, pemerintah Kolombia meminta bergabung ke Mahkamah Internasional PBB (ICJ) terkait dugaan Israel melakukan genosida terhadap Palestina. Langkah-langkah tegas Kolombia ini mengindikasikan bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara dapat terputus akibat kebijakan Israel di Palestina (Kolombia akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, td).

Dalam perkembangan terbaru terkait konflik Israel-Palestina, tiga negara Eropa - Norwegia, Irlandia, dan Spanyol - telah mengambil langkah signifikan dengan mengakui negara Palestina. Keputusan ini diumumkan pada 22 Mei, dengan Norwegia memimpin inisiatif tersebut (Norway, td). Dalam perkembangan terbaru konflik Israel-Palestina, tiga negara Eropa - Norwegia, Irlandia, dan Spanyol - secara resmi mengakui negara Palestina. Pengumuman ini dilakukan pada 22 Mei, dengan Norwegia memimpin inisiatif tersebut. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Khayrullin, 2024) bahwasanya mayoritas negara arab bersatu untuk melawan kekejaman Israel dan negara Amerika yang mendukung atas kekejaman Israel, Negara seperti China dan Rusia menginginkan konflik antara Israel-Palestina segera berakhir dan meneukan solusi atas konflik kedua negara tersebut. Para pemimpin negara-negara ini menekankan bahwa keputusan ini bertujuan

untuk mendukung solusi dua negara dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Perdana Menteri Norwegia menyatakan bahwa pengakuan ini merupakan investasi untuk perdamaian, sementara Menteri Luar Negeri Irlandia menegaskan dukungan terhadap persamaan hak atas keamanan dan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Palestina dan Israel. Penting untuk dicatat bahwa ketiga negara ini membedakan antara pengakuan terhadap negara Palestina dan dukungan terhadap Hamas, dengan Perdana Menteri Spanyol menegaskan bahwa langkah ini tidak ditujukan melawan Israel atau orang Yahudi, melainkan untuk mendukung perdamaian dan koeksistensi.

KESIMPULAN

Intifada merupakan gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan dan penindasan Israel. Gerakan ini terjadi dalam dua gelombang utama: Intifada I (1987-1993) dan Intifada II atau Intifada Al-Aqsa (2000-2007). Intifada I ditandai dengan perlawanan non-kekerasan, sementara Intifada II lebih militaristik. Faktor-faktor pemicu Intifada meliputi penindasan, pembunuhan, dan eksploitasi sumber daya oleh Israel terhadap rakyat Palestina.

Rakyat Palestina mendirikan beberapa organisasi/gerakan pembebasan dalam upaya meraih kemerdekaan dari Israel, Fatah yang didirikan tahun 1957 di Kuwait, merupakan organisasi pertama dari kalangan Arab-Muslim Palestina. Organisasi Pembebasan Palestina (OPP/PLO): Dibentuk tahun 1959 atas prakarsa Presiden Liga Arab. Di bawah kepemimpinan Yasser Arafat sejak 1969, OPP mendapat pengakuan internasional dan status anggota pengawas di PBB. Hamas yang didirikan pada 14 Desember 1987, merupakan cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Hamas berjuang untuk memerdekakan Palestina dan mendirikan negara Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ketiga organisasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu pembebasan Palestina, namun dengan pendekatan dan ideologi yang berbeda-beda.

Beberapa negara mengambil sikap kontra terhadap Israel terkait konflik Palestina-Israel di antaranya Iran dengan memutus hubungan diplomatik pasca Revolusi Islam 1979, mendukung Palestina. Turki menyebabkan hubungan memburuk, membatasi perdagangan dengan Israel. Brasil mengambil sikap dengan Menarik duta besar dari

Israel. Yordania dengan memanggil pulang duta besar, mengecam tindakan Israel di Gaza. Kolombia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik, menghentikan pembelian senjata Israel. Bolivia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang Mengakui negara Palestina untuk mendukung solusi dua negara.

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fokus terhadap isu-isu sosial mengenai konflik antara Palestina-Israel. Penelitian mengenai dampak psikologis yang dirasakan oleh masyarakat Palestina pasca konflik dengan Israel, ditinjau dengan beberapa teori atau kajian yang sesuai dengan hal tersebut, seperti kajian psikoanalisis, sosiologi dan beberapa kajian yang lain, dari segi ekonomi meneliti dampak perekonomian masyarakat Palestina ketika berlangsungnya konflik dan pasca konflik dengan Israel. Dengan beberapa penelitian di atas akan mampu memberikan pemahaman secara komprehensif terkait pengaruh dari adanya konflik antara Israel-Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qayyum M Suhaimi, Mohd Roslan Mohd Nor. (2018), "Penentangan Rakyat Palestina Terhadap Israel Dalam Intifadah Pertama 1987: Kronologi Dan Kesannya Ke Atas Konflik Di Palestina", 53–54.
- Mhd Ilham, (2019). "Status Quo Konflik Iran - Israel (2005-2018)," *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 23(1), 1–8, <https://doi.org/10.37108/tabuah.v23i1.213>.
- Aswir F Badjodah, Mahmud Husen, and Saiful Ahmad. (2021), Dinamika Konflik Dan Upaya Konsensus Palestina-Israel (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 409–20. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619>.
- Flammer, Caroline, and Ioannis Ioannou. (2015), Efektivitas Strategi Foeme Dalam Proyek Good Water Neighbors Sebagai Upaya Bina Damai Kawasan Timut Tengah. *Brigham Young University* 1(69), 5–24.
- Ilham, Mhd. (2019), Status Quo Konflik Iran - Israel (2005-2018). *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 23(1), 1–8. <https://doi.org/10.37108/tabuah.v23i1.213>.
- Jazeera, Al. (2023). "Bolivia Memutuskan Hubungan Dengan Israel; Negara-Negara Amerika Latin Lainnya Menarik Utusannya." <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/1/bolivia-cuts-ties-with-israel-other-latin-american-countries-recall-envoys>. Diakses pada 1 November 2023.
- Kaslam. (2021), Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan

Geografi Politik). *Review of International Relations* 3(2), 113–28. <https://www.pollux-fid.de/r/base-ftunialaudinmaka:oai:journal.uin-alauddin.ac.id:article/23527>.

Khumairoh, Mahlil Idatul, and Abdul Fadhil. (2019), Gerakan Intifadhah Dan Kemunculan Hamas (1987-1993). *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 1–14.

Khayrullin, T. R. (2024). The Palestinian-Israeli Conflict of 2023: The Response of Global and Regional Actors. *Asia and Africa Today*, 6, 15–24. <https://doi.org/10.31857/S032150750031034-9>

VOA Indonesia. (2023). "Kolombia Akan Memutuskan Hubungan Diplomatik Dengan Israel." Dalam *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/kolombia-akan-putuskan-hubungan-diplomatik-dengan-israel/7594842.html>.

Minhajuddin, Minhajuddin, and Ahmad Khoirul Umam. (2023), Implikasi Normalisasi Hubungan Diplomatik Negara-Negara Timur Tengah Dengan Israel Terhadap Prospek Kemerdekaan Palestina: Telaah Konstruktivisme. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 184. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.10>.

Mudore, Syarif Bahaudin. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, 12(2), 170. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>.

Muslim, A S. (2023). "Persaingan Drone Iran-Israel Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Timur Tengah." Dalam *Researchgate. Net*. https://www.researchgate.net/profile/Adil-Muslim/publication/371732045_Persaingan_Drone_Iran-Israel_dan_Pengaruhnya_terhadap_Stabilitas_Timur_Tengah/links/6492b1098de7ed28ba40f36b/Persaingan-Drone-Iran-Israel-dan-Pengaruhnya-terhadap-Stabilitas-Timur-Teng.

Norway. (2024). "Ireland and Spain Recognise Palestine as a State." <https://www.bbc.com/news/world-europe-68345678>. Diakses pada 23 Mei 2024

Paula Rosas. (2024). "Negara Mana Saja Yang Melakukan Aksi Konkret Menentang Israel Dan Apa Dampaknya," Dalam *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyx6xk7d5ydo>. Diakses pada 12 November 2024.

Report, B'Tselem. (1999), "Oslo: Before and after: The Status of Human Rights in the Occupied Territories." http://www.btselem.org/publications/summaries/199905_oslo_before_and_after. Diakses pada 19 Juni 2022.

Rijal Fadli, Muhammad. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21(1), 33-54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.

- Romadhony, Aliefya Shalfadillah, Naurah Engrasia Yulianto, and Amelia Putri Purwati. (2024), Ham Dalam Hukum Internasional Pade Perang Palestina Dan Israel. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1). 101–23.
- Sari, Amalia Tri Puspita. (2022), Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II Dalam Perspektif Konstruktivisme Dan Strategi Politik. *Jurnal ICMES*, 6(1), 21–34. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.120>.
- Shaleh, Muhsin Muhammad. (2002) *Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*. terj. Tim Comes. Jakarta: Gema Insani Press,
- Thea Arbar. “Isolasi Israel Meningkatkan Pasca Turki Putuskan Hubungan Dagang.” Dalam *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240504134238-4-535737/isolasi-israel-meningkat-pasca-turki-putuskan-hubungan-dagang>.
- Khayrullin, T. R. (2024). The Palestinian-Israeli Conflict of 2023: The Response of Global and Regional Actors. *Asia and Africa Today*, 6, 15–24. <https://doi.org/10.31857/S032150750031034-9>